

Flood Disaster and Business Continuity of Micro, Small, and Medium Enterprises in Padang: (Finance, Operational and Marketplace Risk)

Rika Septrizarty, Wila Farlina, Meci Nilam Sari, Dabitha Wise Maliha

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah Padang

¹septrizarty@gmail.com, ²wila.farlina0103@gmail.com, ³mecinilamsari@stiaadabiah.ac.id,

⁴dabithawisemaliha@stiaadabiah.ac.id

Abstrak

Bencana banjir yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sebelumnya telah berada dalam kondisi rentan akibat melemahnya daya beli pascapandemi Covid-19. Di tengah keterbatasan penelitian yang membahas keterkaitan antara bencana alam dan ketahanan UMKM, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak banjir terhadap kelangsungan usaha serta strategi adaptasi yang dilakukan pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi lapangan untuk menggambarkan tingkat kerentanan, dampak operasional, serta respons UMKM terhadap gangguan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh UMKM di sekitar pusat bencana, tetapi juga oleh pelaku usaha secara luas akibat rusaknya infrastruktur publik, terputusnya akses jalan, dan terganggunya pasokan air bersih dari PDAM, yang menyebabkan terhambatnya rantai pasok dan aktivitas produksi. UMKM yang berada di lokasi terdampak langsung bahkan mengalami kerugian besar hingga penutupan permanen akibat kerusakan atau hilangnya tempat usaha. Sementara itu, UMKM di wilayah terdampak tidak langsung harus menghentikan operasional sementara hingga kondisi kembali normal. Kerentanan UMKM semakin tinggi pada usaha yang tidak memiliki dana darurat dan memiliki margin keuntungan yang kecil. Di sisi lain, pemanfaatan digital marketing dan penjualan daring terbukti membantu mempertahankan aktivitas usaha ketika toko fisik tidak dapat beroperasi. Temuan ini menegaskan pentingnya perancangan strategi mitigasi bencana yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan akademisi, khususnya melalui dukungan pembiayaan, perbaikan infrastruktur, serta penguatan manajemen risiko berbasis keberlanjutan.

Kata Kunci: Keberlanjutan Bisnis, Bencana Alam, UMKM, Resiko

1. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dalam menghadapi pandemi covid 19 karena meningkatkan kemampuan transformasi digital, memastikan dukungan keuangan, dan memperkuat manajemen rantai pasokan. UMKM menjadi lebih tangguh dan dapat mempertahankan diri dan beradaptasi dengan gejolak ekonomi serta dapat merangsang ekspansi ekonomi dan mendorong inovasi (sapthany, et al, 2025).

Pengusaha wanita, pengusaha gen Z dan milenial menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan pandemi. Perempuan mampu untuk memanfaatkan aset keberlanjutan dari mata pencarian, yang terdiri dari aset keuangan, aset sumber daya alam, aset sosial, aset fisik dan aset intelektual yang menciptakan strategi bisnis (Hendratmi dkk, 2022). Sedangkan milenial dan gen Z yang menjadi pemilik UMKM mampu untuk beradaptasi dengan digitalisasi, kekuatan sosial media, big data dan pengaruh internet (Samputra dan Alfarizi, 2025).

Kontribusi yang sangat besar diberikan oleh UMKM terhadap perekonomian Indonesia karena jumlah UMKM di Indonesia sangat besar. Letak geografis Indonesia yang rentan dengan bencana alam membuat UMKM Indonesia juga rentan terhadap bencana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, dkk. 2021) bahwa UMKM di Indonesia memiliki tingkat ketahanan yang rendah karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami bagaimana mitigasi bencana untuk kelangsungan usaha.

Kekurangan kemampuan beradaptasi dari sumber daya manusia juga merupakan masalah UMKM dunia. Hal ini terlihat pada hasil penelitian terhadap respon UMKM di Yunani terhadap bencana banjir yang dilakukan oleh (Sakulosis, dkk. 2022) Hasil menunjukkan bahwa hampir semua pemilik UMKM di Yunani belum siap menghadapi dampak bencana banjir terhadap kelangsungan usaha mereka.

Flood Disaster and Business Continuity of Micro, Small, and Medium Enterprises in Padang: (Finance, Operational and Marketplace Risk)

Peningkatan kemampuan mitigasi bencana tidak berfokus pada pemilik UMKM saja, karena penanganan bencana melibatkan transformasi waktu yang panjang dan banyak pihak yang saling terkait seperti pemerintah, baik pusat maupun lokal, masyarakat sekitar, budaya daerah, si pembuat perubahan “(agent of change)” dan jaringan sosial di daerah tersebut menjadi kunci penting dalam penanganan bencana dan perencanaan mitigasi bencana (Maursha, dkk. 2023).

Banjir yang terjadi di kota Padang pada akhir November 2025 menambah rentannya keberlangsungan UMKM. Akses jalan terputus, fasilitas PDAM rusak, listrik mati sehingga mengakibatkan kampus dan sekolah diliburkan. Bagaimanakah UMKM di kota Padang bertahan menghadapi bencana banjir ini?. Bagaimana respon dan strategi resiko pelaku UMKM dalam menghadapi bencana banjir?. Berdasarkan pertanyaan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana respon dan strategi resiko UMKM di kota Padang dalam menghadapi bencana banjir dengan membahas resiko keuangan dan resiko operasional dan resiko marketplace yang menjadi kekuatan UMKM untuk bertahan di saat pandemi yang lalu serta tantangan apa saja yang dihadapi untuk kelangsungan UMKM. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pengusaha wanita, pengusaha gen Z dan milenial di kota Padang memiliki kemampuan dalam bertahan terhadap bencana seperti halnya ketangguhan dalam menghadapi pandemi covid 19.

Tinjauan Pustaka

Risiko adalah suatu peristiwa yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi (menghambat, meningkatkan, atau menimbulkan keraguan tentang) efektivitas dan efisiensi proses inti suatu organisasi

Risiko dapat memiliki hasil positif atau negatif, atau hanya menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, risiko dapat dianggap terkait dengan peluang, kerugian, atau adanya ketidakpastian bagi suatu organisasi. Setiap risiko memiliki karakteristiknya sendiri yang memerlukan manajemen atau analisis khusus. Dalam buku ini, risiko dibagi menjadi empat kategori:

- a. Risiko kepatuhan (atau wajib);
- b. risiko bahaya (atau murni);
- c. risiko pengendalian (atau ketidakpastian);
- d. risiko peluang (atau spekulatif).

Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity)

Keberlangsungan bisnis adalah cara sebuah organisasi mempersiapkan diri menghadapi insiden di masa depan yang dapat membahayakan keberadaannya. Cakupan insiden yang harus dicakup meliputi segala hal mulai dari peristiwa lokal seperti kebakaran hingga gangguan regional seperti gempa bumi atau insiden keamanan nasional, dan meluas hingga peristiwa internasional seperti terorisme dan pandemi.(Hopkin 2017).

Siklus Business Continuity Planning atau BCP memiliki lima komponen yang terkait dengan kelangsungan manajemen bisnis, yaitu:

- a. Mengidentifikasi faktor risiko yang telah mempengaruhi organisasi
- b. Memahami kebutuhan perusahaan
- c. Membangun dan menerapkan jiwa organisasi atau usaha
- d. Mengukur kemampuan keseluruhan untuk mengelola kejadian yang menyebabkan adanya risiko
- e. Menjamin kesesuaian dengan kebijakan lekangsungan bisnis yang ditetapkan

2. Metode Penelitian

Langkah awal dari penelitian ini adalah studi literatur. Penulis menghimpun hasil penelitian mengenai keberlangsungan bisnis umkm dan bencana, baik pandemi maupun bencana alam. Berdasarkan studi literatur di atas, penulis melakukan investigasi melalui wawancara dengan informan kunci mengenai respon, strategi dan budaya resiko dari 3 resiko, yaitu resiko keuangan, resiko operasional dan resiko marketplace. Selanjutnya analisis data dengan menjelaskan respon dan startegi resiko serta keunggulan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di kota Padang pasca banjir bandang. Kesimpulan dan saran dipaparkan sebagai pertimbangan dan pijakan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang lebih dalam dan luas.

Terdapat dua metode dari penelitian ini. Pertama metode literatur review. Jurnal pertama yang diseleksi adalah pada *finder* jurnal Elsevier dengan kata kunci *Natural Disaster and Business Continuity of MSME in Developing Country*. Selanjutnya pencarian tambahan jurnal terakreditasi pada google scholar Jurnal dengan kata kunci *Natural Disaster and Business Continuity of MSME in Indonesia*. Metode selanjutnya adalah investigasi dengan dua cara, yaitu wawancara mendalam dengan informan kunci dan riset partisipasi aktif dalam usaha UMKM pada usaha terdampak.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengelompokan UMKM berdasarkan dampak banjir.

UMKM yang terdampak banjir di kota Padang pada akhir dikelompokkan berdasarkan dampak dari resiko terhadap kelangsungan usaha.

1. UMKM yang berlokasi di pusat banjir, yaitu daerah aliran PLTA Batu Busuk, Gunung Nago dan Pemandian Lubuk Minturun. Kerusakan yang dialami berupa roboh dan hanyutnya tempat usaha. Hal ini mengakibatkan usaha tutup total.
2. UMKM yang berlokasi di sepanjang daerah aliran Sungai (DAS), seperti aliran dari Batu Busuk dan Gunung Nago, yang meliputi sepanjang daerah Pauh, jalan ke kampus Universitas Andalas, Kuranji, Korong Gadang, Gurun Laweh, Nanggalo, Tunggul Hitam dan Daerah Brandon Daerah Lubuk Minturun, Koto Pulai, Batang Kabung dan Pasir nan Tigo. Kelompok usaha ini berhenti beroperasi lebih dari seminggu, tergantung banyak pemulihan tempat usaha dari air banjir yang mengandung lumpur. Beberapa usaha mengalami kerusakan alat-alat produksi dan asset usaha. Sebagian besar dari UMKM ini belum bisa beroperasi dengan normal. Kelompok ini dinamakan kelompok transfer
3. UMKM yang terdampak secara tidak langsung, yaitu UMKM yang berlokasi jauh dari pusat banjir. Hampir seluruh UMKM terdampak, akibat pembeli terdampak banjir. Seperti contoh UMKM sekitar kampus mengalami penurunan penjualan karena kampus mengubah perkuliahan tatap muka menjadi perkuliahan online sehingga mahasiswa sebagai konsumen UMKM sebagian besar pulang kampung atau tidak ke kampus. Putusnya jalan dan rusaknya fasilitas PDAM mengakibatkan terganggunya jadwal operasional UMKM karena putusnya rantai pasok yang menyuplai bahan baku dan bahan pendukung proses operasi.
4. UMKM yang sedikit terdampak dalam operasional. Usaha makanan merupakan yang sedikit terdampak. Sebagai contoh usaha sarapan pagi di daerah Parupuk tabing, yang berlokasi jauh dari DAS tidak beroperasi di selama dua hari karena tidak ada karyawan yang bisa bekerja. Hal ini disebabkan rumah mereka terdampak banjir dan tidak adanya air untuk PDAM untuk kegiatan produktif reproduktif. UMKM yang tidak terdampak sama sekali, misalnya usaha yang tidak bergantung dengan air dari PDAM serta konsumen usaha bukan dari kalangan mahasiswa dan berlokasi jauh. Jumlah kelompok ini sangat sedikit, karena rata-rata Masyarakat di kota Padang menggunakan air PDAM dan jalan akses ke kota Padang juga tertutup dari daerah Padang Panjang dan Bukittinggi karena hari yang sama pada tanggal 27 November 2025 galodo juga terjadi di jambatan kembar Padang Panjang penghubung Kota Padang dengan Kota Padang Panjang melalui kota Pariaman.

3.2. Respon dan Strategi Resiko

Berdasarkan wawancara mendalam dengan infroman kunci, yaitu pemilik UMKM pada setiap kelompok UMKM terdampak,

1. Kelompok *Catastrophic/ Bencana Dahsyat*: Pelaku UMKM harus mencari lokasi baru dan membangun kembali toko atau menyewa tempat yang lebih aman dan jauh dari daerah aliran Sungai. Untuk mendukung pemulihan pasca bencana, bantuan pemerintah berupa pinjaman dengan bunga rendah dan tenor waktu peminjaman yang lebih anjang dan keringanan lainnya yang diberikan pemerintah. Hal ini sangat diperlukan bagi pelaku UMKM, karena Sebagian besar dari pelaku UMKM belum siap dengan dana cadangan. Selain itu, bencana banjir ini adalah bencana yang tidak diprediksi sebelumnya oleh pelaku usaha dan juga pemerintah.
2. Kelompok *Severe* (Berat): Menggunakan dana cadangan untuk kelangsungan operasional usaha. Memperbaiki alat dan prasarana yang rusak karena lumpur dan air. Promo produk diberlakukan lebih lama untuk menarik konsumen agar biaya perbaikan untuk pemulihan pasca banjir tertutupi.
3. Kelompok *Moderate* (sedang): Mencari pengganti air PDAM untuk kelangsungan usaha. Seminggu pasca bencana banjir, Masyarakat dan pelaku UMKM mengganti air PDAM dengan air gallon yang akhirnya juga menyebabkan kebutuhan air gallon meningkta dan terjadi kelangkaan air gallon. Selain itu, masyarakat menghidupkan kembali sumur bor. Hal ini dilakukan karena perkiraan cuaca ekstrim di Indonesia akan

berlangsung selama 3 (tiga) bulan ke depan setelah bencana terjadi. Pemanfaatan transformasi digital seperti social media dan penjualan online menjadi pilihan utama untuk kelangsungan bisnis. Hal ini bertujuan agar konsumen tetap terjangkau dan komunikasi dengan konsumen tetap terjalin meskipun tidak berinteraksi secara langsung akibat terputusnya jalan.

4. Kelompok *Small* (Ringan): Kelompok ini melakukan respon resiko dengan mengganti alternatif pengganti bagian dari rantai pasok yang terputus akibat jalan tidak bisa dilalui. Hubungan baik dengan stakeholder menjadi kekuatan dalam menjaga rantai pasok tetap berjalan. Dari wawancara dengan penjual santan, karena hubungan baik dengan petani kelapa, supplai ke tokonya kebih diutamakan dibandingkan toko lain sesama toko santan. Jumlah pasokan kelapa berkurang karena jalan menuju parak kelapa tergenang banjir.

3.3. Ketangguhan Pengusaha Perempuan dan Pengusaha Gen Milenial dan Gen Z

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, ketangguhan pelaku UMKM dalam bertahan adalah dengan memanfaatkan peluang yang ada pada aspek mata pencaharian. Wanita pengusaha lebih banyak memiliki jaringan pergaulan dan kelompok bisnis. Keunggulan wanita dalam menggunakan sosial media dan menjalankan bisnis online menjadi kekuatan bagi usaha mereka. Selain itu, sistem matrilineal yang dimiliki oleh orang Minangkabau, dengan aturan wanita mendapat hak dan warisan dari orang tua, membuat wanita pengusaha di kota Padang memiliki simpanan dana cadangan. Begitu juga dengan gen milenial dan gen Z sebagai pemilik UMKM yang memiliki kepiawaian dalam menggunakan teknologi transformasi digital menjadi untuk kelangsungan bisnis.

3.4. Kendala dalam pemulihan usaha pasca banjir berdasarkan manajemen risiko perusahaan:

1. Risiko Keuangan
 - a. Banyak pelaku UMKM di kota Padang yang belum siap dengan bencana banjir bandang, apalagi kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat pasca covid belum kembali normal. Perlunya dana cadangan bagi pelaku UMKM. Sedangkan untuk menambah pinjaman di bank, mereka kesulitan untuk membayar angsurannya karena pemasukan tidak seimbang.
 - b. Pelaku UMKM kota Padang yang hampir sebagian besar merupakan orang Minangkabau, yang sebagian besar tidak memiliki asuransi usaha. Hal ini disebabkan budaya Minangkabau yang tidak suka dengan ketidakpastian. Karena menurut mereka asuransi itu sesuatu yang tidak pasti dan juga sedikit sekali asuransi syariah yang didasarkan atas azaz saling membantu dan bersedekah, bukan ketidakpastian.
2. Resiko Operasional dan Infrastruktur
 - a. Masalah rantai pasok menjadi penyebab utama tidak berjalannya proses operasi dalam sebuah perusahaan. Putusnya pasokan bahan baku, distribusi produk menjadi penyebab terganggunya operasional tepat waktu. Dibutuhkan kerjasama pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak pasca banjir, banyak fasilitas yang belum diperbaiki. Keterbatasan alat berat dan tenaga menjadi kendala utama. Bahkan masyarakat bahu membahu membangun bendungan pembatas sungai agar tidak terjadi banjir susulan dan meluap lebih jauh lagi ke area perumahan dan pertokoan.
 - b. Tidak adanya jalan alternatif sehingga pelaku UMKM di daerah dengan terdampak jalan utama putus menjadi terisolir dan tidak bisa melakukan aktivitas usaha.
3. Risiko Marketplace
 - a. UMKM yang tidak melakukan transformasi digital mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha. Digital marketing dan sosial media menjadi solusi bisnis yang murah meriah, tanpa ada toko offline sehingga dapat menghemat biaya toko dan gudang.
 - b. Perlunya peningkatan teknologi *blockchain*, sehingga dokumen fisik yang rusak karena banjir tetap aman.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadisih tahun 2025 (referensi nomor 7) bahwa untuk tercapainya ketangguhan tanggap bencana, masyarakat perlu diberi pelatihan mengenai perencanaan risiko dan pemulihan bencana dan berbeda dengan hasil penelitian Yanuari dkk tahun 2023 (referensi nomor 8) yang menyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan pengaruh yang besar dalam pemulihan bisnis di sektor UMKM bidang pariwisata akibat gempa Lombok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing dan sistem keuangan digital memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dampak banjir terhadap aktivitas ekonomi, khususnya UMKM, tercermin dari menurunnya volume produksi, terganggunya distribusi, serta hilangnya akses

terhadap pasar konvensional. Dalam situasi tersebut, pemanfaatan platform digital menjadi strategi adaptif yang memungkinkan pelaku usaha tetap mempertahankan keberlangsungan operasional meskipun infrastruktur fisik mengalami kerusakan.

Digital marketing terbukti berperan dalam memulihkan keterhubungan antara produsen dan konsumen. Melalui media sosial, e-commerce, dan aplikasi pesan instan, pelaku UMKM dapat mempromosikan produk, berkomunikasi dengan pelanggan, serta membangun kembali kepercayaan pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan konten digital, promosi daring, dan pemasaran berbasis komunitas mampu meningkatkan eksposur produk dan mempercepat pemulihan permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa digital marketing tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan pasar dalam situasi pasca bencana.

Selain itu, keuangan digital memberikan kontribusi penting dalam menjaga likuiditas usaha dan memperlancar arus transaksi. Sistem pembayaran digital seperti mobile banking, dompet elektronik, dan QR payment memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi tanpa bergantung pada uang tunai atau keberadaan fisik lembaga keuangan. Penyaluran bantuan, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, juga lebih efisien dan akuntabel melalui sistem keuangan digital. Temuan ini sejalan dengan teori inklusi keuangan digital yang menyatakan bahwa teknologi finansial mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya dalam kondisi krisis.

Integrasi antara digital marketing dan keuangan digital menciptakan ekosistem pemulihan ekonomi yang lebih resilien. Pelaku usaha tidak hanya dapat memasarkan produknya secara daring, tetapi juga menerima pembayaran secara real-time, mencatat transaksi secara otomatis, serta mengakses pembiayaan berbasis teknologi finansial. Hal ini mempercepat siklus usaha dan membantu UMKM mengelola risiko keuangan pasca banjir. Dengan demikian, teknologi digital berperan sebagai katalisator dalam proses pemulihan dan transformasi ekonomi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pemanfaatan digital marketing dan keuangan digital merupakan strategi efektif dalam membangun kembali aktivitas ekonomi pasca bencana banjir. Implementasi kedua instrumen ini tidak hanya berdampak pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan, peningkatan literasi digital, serta penguatan infrastruktur teknologi agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat terdampak.

3.5. Pembahasan Mendalam Dampak Banjir terhadap Keberlangsungan UMKM di Kota Padang

Banjir yang terjadi di Kota Padang pada akhir November 2025 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam yang bersifat temporer, melainkan sebagai guncangan sistemik (systemic shock) terhadap keseluruhan ekosistem UMKM. Ekosistem UMKM mencakup pelaku usaha, tenaga kerja, pemasok bahan baku, konsumen, lembaga keuangan, infrastruktur publik, serta kebijakan pemerintah. Ketika banjir terjadi, seluruh komponen tersebut mengalami gangguan secara simultan, sehingga dampaknya bersifat berantai dan memperpanjang proses pemulihan usaha.

Gangguan sistemik ini terlihat dari terhentinya aktivitas produksi akibat rusaknya tempat usaha, terganggunya distribusi karena akses jalan terputus, serta menurunnya permintaan akibat berkurangnya daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, UMKM berada pada posisi yang sangat rentan karena keterbatasan modal, skala usaha yang kecil, serta ketergantungan tinggi pada arus kas harian. Tidak seperti perusahaan besar yang memiliki cadangan dana dan sistem manajemen risiko yang mapan, sebagian besar UMKM di Kota Padang menjalankan usaha dengan margin keuntungan yang tipis dan tanpa perencanaan keberlanjutan bisnis yang terstruktur.

Banjir juga memperlihatkan lemahnya integrasi antara perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang memilih lokasi usaha di sekitar daerah aliran sungai karena faktor kedekatan dengan konsumen dan biaya sewa yang relatif murah. Namun, pilihan lokasi tersebut justru meningkatkan eksposur risiko terhadap bencana banjir. Hal ini menunjukkan bahwa risiko lingkungan sering kali belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan bisnis UMKM.

Risiko keuangan merupakan salah satu dampak paling nyata yang dirasakan pelaku UMKM pasca banjir. Kerusakan aset usaha, hilangnya persediaan, serta terhentinya operasional menyebabkan penurunan pendapatan secara drastis. Sementara itu, kewajiban keuangan seperti cicilan pinjaman, biaya sewa, dan upah tenaga kerja tetap harus dipenuhi. Ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran ini menempatkan UMKM pada kondisi financial distress.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Padang belum memiliki dana darurat usaha. Ketergantungan pada modal sendiri dan pinjaman informal membuat mereka kesulitan untuk segera bangkit setelah bencana. Akses terhadap pembiayaan formal juga menjadi tantangan, terutama bagi UMKM yang tidak

memiliki agunan atau riwayat kredit yang memadai. Dalam kondisi pasca bencana, risiko gagal bayar (default risk) meningkat, sehingga lembaga keuangan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Di sisi lain, rendahnya tingkat kepemilikan asuransi usaha memperbesar kerugian yang harus ditanggung pelaku UMKM. Faktor budaya, minimnya literasi keuangan, serta keterbatasan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi penghambat utama adopsi asuransi. Padahal, asuransi dapat berfungsi sebagai mekanisme transfer risiko yang efektif untuk melindungi UMKM dari kerugian besar akibat bencana alam.

Risiko operasional pasca banjir tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik tempat usaha, tetapi juga dengan terganggunya fungsi-fungsi pendukung operasional. Putusnya pasokan listrik, rusaknya jaringan PDAM, serta terhambatnya distribusi bahan baku menunjukkan tingginya ketergantungan UMKM terhadap infrastruktur publik. Ketika infrastruktur tersebut lumpuh, UMKM tidak memiliki alternatif yang memadai untuk menjaga kelangsungan produksi.

Kondisi ini mengungkap pentingnya perencanaan operasional yang adaptif dan fleksibel. UMKM yang memiliki lebih dari satu pemasok, alternatif sumber air, serta kemampuan untuk menyesuaikan jam operasional terbukti lebih mampu bertahan dibandingkan UMKM yang bergantung pada satu sumber saja. Namun demikian, kemampuan untuk melakukan diversifikasi operasional sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial dan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur jalan alternatif menyebabkan beberapa wilayah terdampak menjadi terisolasi. Hal ini tidak hanya menghambat distribusi barang, tetapi juga membatasi mobilitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas dan daya saing UMKM di wilayah tersebut.

Banjir juga memengaruhi dinamika pasar dan perilaku konsumen. Dalam situasi pasca bencana, konsumen cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar dan mengurangi pengeluaran untuk barang non-esensial. Hal ini berdampak langsung pada UMKM di sektor kuliner, fesyen, dan jasa yang bergantung pada konsumsi harian.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa UMKM yang telah memanfaatkan digital marketing dan platform daring memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan akses pasar. Media sosial dan aplikasi pesan instan memungkinkan pelaku usaha untuk tetap berkomunikasi dengan konsumen, menerima pesanan, serta melakukan promosi tanpa harus membuka toko fisik. Perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa dengan transaksi daring menjadi peluang strategis bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, bahkan di luar wilayah terdampak banjir.

Di sisi lain, UMKM yang belum melakukan transformasi digital mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Keterbatasan literasi digital, akses internet, serta kepercayaan terhadap transaksi daring menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui pelatihan dan pendampingan.

Digital marketing berperan sebagai instrumen penting dalam strategi pemulihan UMKM pasca banjir. Melalui konten promosi yang relevan dan empatik, pelaku usaha dapat membangun kembali kepercayaan konsumen serta meningkatkan visibilitas produk. Penggunaan strategi pemasaran berbasis komunitas lokal juga terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan permintaan.

Selain itu, digital marketing memungkinkan UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik yang rentan terhadap bencana. Dengan memanfaatkan platform e-commerce dan layanan pengantaran, UMKM dapat menjangkau konsumen tanpa harus menanggung biaya operasional toko yang tinggi. Dalam jangka panjang, strategi ini dapat meningkatkan efisiensi dan ketahanan bisnis.

Keuangan digital memainkan peran strategis dalam menjaga likuiditas UMKM pasca banjir. Sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi tetap berlangsung meskipun akses ke lembaga keuangan konvensional terganggu. Selain itu, pencatatan transaksi secara digital membantu pelaku usaha dalam mengelola arus kas dan mengajukan pembiayaan secara lebih transparan.

Penyaluran bantuan pemerintah dan lembaga sosial melalui platform digital juga meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas distribusi dana. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi keuangan digital dalam sistem penanggulangan bencana dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat.

Modal sosial, seperti hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan komunitas lokal, terbukti menjadi faktor penting dalam ketangguhan UMKM. Praktik gotong royong dan solidaritas sosial membantu pelaku usaha untuk saling mendukung dalam proses pemulihan. Dalam konteks budaya Minangkabau, nilai-nilai kolektivitas dan jaringan kekerabatan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan UMKM untuk bertahan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan pengembangan UMKM berbasis mitigasi bencana. Pemerintah perlu mengintegrasikan aspek manajemen risiko bencana dalam program pemberdayaan UMKM, termasuk melalui penyediaan pembiayaan darurat, penguatan literasi keuangan dan digital, serta perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam membangun ketahanan UMKM. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih resilien terhadap bencana di masa depan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa keberlangsungan UMKM pasca banjir sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap risiko keuangan, operasional, dan marketplace. Transformasi digital, penguatan modal sosial, serta dukungan kebijakan yang tepat menjadi faktor penentu dalam membangun ketahanan dan keberlanjutan UMKM di Kota Padang.

3.6. Implikasi Manajerial dan Kebijakan dalam Meningkatkan Ketahanan UMKM Pasca Banjir

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga merupakan ujian nyata terhadap kapasitas manajerial dan ketahanan kelembagaan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan implikasi strategis yang bersifat manajerial dan kebijakan guna memastikan keberlangsungan UMKM di wilayah rawan bencana seperti Kota Padang. Implikasi ini penting agar upaya pemulihan tidak bersifat reaktif dan jangka pendek, melainkan terintegrasi dalam perencanaan bisnis dan pembangunan ekonomi daerah.

Dari sisi manajerial, pelaku UMKM perlu mulai menginternalisasi konsep manajemen risiko dan business continuity planning (BCP) dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Selama ini, sebagian besar UMKM menjalankan usaha dengan orientasi jangka pendek dan fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional harian. Kondisi ini menyebabkan UMKM sangat rentan ketika terjadi gangguan eksternal seperti banjir. Oleh karena itu, penyusunan rencana darurat sederhana, seperti pemetaan risiko lokasi usaha, penyediaan dana cadangan, diversifikasi pemasok, serta alternatif saluran pemasaran, menjadi langkah strategis yang perlu diterapkan secara bertahap sesuai dengan kapasitas UMKM.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan menjadi aspek krusial dalam memperkuat ketahanan UMKM. Pemahaman mengenai pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan, serta pemanfaatan produk keuangan formal akan membantu pelaku usaha dalam mengantisipasi kondisi krisis. Keuangan digital tidak hanya berperan sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan risiko yang memungkinkan UMKM memantau kondisi keuangan secara real-time dan mengakses pembiayaan dengan lebih cepat dan transparan.

Dari sisi operasional, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan rantai pasok. UMKM yang memiliki jaringan pemasok yang luas dan hubungan yang baik dengan mitra usaha terbukti lebih mampu bertahan dibandingkan UMKM yang bergantung pada satu sumber pasokan. Oleh karena itu, strategi kolaborasi dan penguatan jejaring usaha perlu menjadi bagian dari budaya bisnis UMKM, terutama di daerah rawan bencana.

Pada aspek pasar, transformasi digital tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan strategis. Digital marketing dan platform daring memungkinkan UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik dan memperluas jangkauan pasar. Dalam konteks pasca banjir, keberadaan kanal digital menjadi faktor pembeda antara UMKM yang mampu bertahan dan yang terpaksa menghentikan operasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital pelaku UMKM melalui pelatihan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh terhadap bencana. Dukungan pembiayaan pasca bencana perlu dirancang secara adaptif dengan mempertimbangkan kemampuan bayar UMKM, seperti melalui skema restrukturisasi kredit, penundaan angsuran, serta penyediaan kredit lunak berbasis pemulihan. Selain itu, integrasi kebijakan penanggulangan bencana dengan program pemberdayaan UMKM menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak ekonomi jangka panjang.

Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur publik juga menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberlangsungan UMKM. Jalan, jaringan air bersih, dan listrik merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi lokal. Tanpa dukungan infrastruktur yang andal, upaya pemulihan UMKM akan berjalan lambat dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu mengadopsi pendekatan pembangunan berketahanan bencana (disaster-resilient development).

Selain pemerintah, peran akademisi dan komunitas lokal juga sangat penting dalam mendukung pemulihan UMKM. Akademisi dapat berkontribusi melalui riset terapan, pendampingan usaha, serta pengembangan model mitigasi bencana berbasis UMKM. Sementara itu, komunitas lokal dan modal sosial yang kuat, seperti praktik

gotong royong dan jaringan kekerabatan, terbukti menjadi sumber daya non-finansial yang sangat berharga dalam proses pemulihan pasca banjir.

Secara keseluruhan, implikasi manajerial dan kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan UMKM terhadap bencana tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu pelaku usaha, tetapi juga oleh dukungan sistemik dari lingkungan kebijakan, infrastruktur, dan sosial. Pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam membangun UMKM yang tidak hanya mampu pulih dari bencana, tetapi juga tumbuh lebih tangguh di masa depan.

4. Kesimpulan

Banjir yang menghantam kota Padang pada akhir November 2025 memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap UMKM di kota Padang. Kelompok yang sangat terdampak dengan risiko berat adalah UMKM yang berada tepat di pusat banjir. Kegiatan UMKM harus terhenti karena toko tempat usaha mereka hanyut dan roboh. Sedangkan untuk UMKM yang terdampak ringan, jumlahnya sangat banyak, karena lokasi berada jauh dari pusat banjir, tetapi tetap menganggu kegiatan operasi perusahaan akibat akses jalan putus sehingga manajemen rantai pasok terganggu. UMKM yang dapat bertahan adalah yang memiliki dana cadangan dan alternatif lain untuk memperkuat rantai pasok. Perlunya hubungan baik dengan semua stakeholder untuk menjamin rantai pasok tetap berjalan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemulihan bencana pasca banjir. Dukungan dana dari pemerintah dan kemudahan dalam proses membayar angsuran sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Selain itu perlunya hubungan yang baik antar sesama masyarakat dalam membangun ekonomi yang dimulai dari gotong royong membangun rumah dan tempat usaha yang terdampak banjir. Pelatihan penggunaan teknologi digital sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk pemulihan pasca banjir, tetapi juga dalam menghadapi keadaan ekonomi yang saat ini belum stabil dan belum bisa dipastikan kapan akan normal kembali. Yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan agar tidak terjadi bencana serupa dengan segera membersihkan sungai, menanam pohon kembali dan menegakkan aturan keberlanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan disamping aspek ekonomi dan sosial. Pencegahan bencana banjir menjadi tugas semua rakyat Indonesia karena dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang tidak memiliki dana cadangan.

Referensi

1. Achsania, H., Hendratmi, A., & colleagues. (2022). Livelihood strategies of women entrepreneurs in Indonesia. *Heliyon*, 8(10), e10804. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10804>
2. Auzzir, Z., Haigh, R., & Amaratunga, D. (2018). Impacts of disaster to SMEs in Malaysia. *Procedia Engineering*, 212, 1131–1138. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.146>
3. Battisti, M., & Deakins, D. (2017). The relationship between dynamic capabilities, the firm's resource base and performance in a post-disaster environment. *International Small Business Journal*, 35(1), 78–98. <https://doi.org/10.1177/0266242615611471>
4. Bosma, N., Content, J., Sanders, M., & Stam, E. (2018). Institutions, entrepreneurship, and economic growth in Europe. *Small Business Economics*, 51(2), 483–499. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0012-x>
5. Crick, J. M., & Crick, D. (2020). Coopetition and COVID-19: Collaborative business-to-business marketing strategies in a pandemic crisis. *Industrial Marketing Management*, 88, 206–213. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.016>
6. Doern, R., Williams, N., & Vorley, T. (2019). Special issue on entrepreneurship and crises: Business as usual? *Entrepreneurship & Regional Development*, 31(5–6), 400–412. <https://doi.org/10.1080/08985626.2018.1541590>
7. Herbane, B. (2013). Exploring crisis management in UK small- and medium-sized enterprises. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 21(2), 82–95. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12006>
8. Hopkin, P. (2018). Fundamentals of risk management: Understanding, evaluating and implementing effective risk management (4th ed.). Kogan Page.
9. ISO. (2019). *ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements*. International Organization for Standardization.
10. Kato, M., & Charoenrat, T. (2018). Business continuity management of small and medium sized enterprises: Evidence from Thailand. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 27, 577–587. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.10.002>
11. Khan, O., & Wisner, J. D. (2019). Supply chain risk management: A review and future research agenda. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 49(3), 282–300. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-02-2018-0057>
12. Martinelli, E., Tagliazucchi, G., & Marchi, G. (2018). The resilient retail entrepreneur: Dynamic capabilities for facing natural disasters. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 46(12), 1222–1243. <https://doi.org/10.1108/IJRDGM-11-2017-0256>
13. Maurischa, S. D., et al. (2023). Transformative resilience: Transformation, resilience and capacity of coastal communities in facing disasters in two Indonesian villages. *Journal of Disaster Risk Reduction*, 85, 103542. <https://doi.org/10.1016/j.jnlrr.2023.103542>
14. Ngadisih. (2025). Landslide disaster risk for small and medium agricultural enterprises (SMAEs). *Environment and Natural Resources Journal*. <https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/enrr/article/view/257179>
15. OECD. (2020). *Coronavirus (COVID-19): SME policy responses*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
16. Pal, R., Torstensson, H., & Mattila, H. (2014). Antecedents of organizational resilience in economic crises—An empirical study of Swedish textile and clothing SMEs. *International Journal of Production Economics*, 147, 410–428. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.02.031>
17. Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries: Evidence from Indonesia. *Eurasian Business Review*, 7(1), 25–41. <https://doi.org/10.1007/s40821-016-0044-6>

18. Samputra, P. L., & Alfarizi, M. (2025). Can advanced society 5.0 technology create economic and social value for millennial and generation Z MSMEs in Surabaya, Indonesia? An economic resilience perspective. *Economic Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2025.101005>
19. Satpathy, A. S., et al. (2025). Strategies for enhancements of MSME resilience and sustainability in the post-COVID-19 era. *Sustainable Futures*, 7, 100420. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2024.100420>
20. Sauser, B. J., Baldwin, C., & Pourreza, S. (2020). Resilience of small businesses in disasters: A systems thinking perspective. *Systems Research and Behavioral Science*, 37(2), 195–210. <https://doi.org/10.1002/sres.2632>
21. Skouloudis, A., et al. (2022). Coping with floods: Impacts, preparedness and resilience capacity of Greek micro-, small- and medium-sized enterprises in flood-affected areas. *Sustainable Cities and Society*, 80, 103772. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103772>
22. Utami, I. D., et al. (2021). Priority resilience strategy for micro, small, and medium enterprises for dealing with natural disasters. *Asia Pacific Management Review*, 26(3), 135–144. <https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2021.02.003>
23. Williams, T. A., Gruber, D. A., Sutcliffe, K. M., Shepherd, D. A., & Zhao, E. Y. (2017). Organizational response to adversity: Fusing crisis management and resilience research streams. *Academy of Management Annals*, 11(2), 733–769. <https://doi.org/10.5465/annals.2015.0134>
24. Yanuardi, et al. (2023). Determinants of business recovery: The role of government support as moderator (A study on tourism SMEs affected by Lombok earthquake, Indonesia). *Human Systems Management*, 42(1), 45–60. <https://doi.org/10.3233/HSM-220171>
